**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perubahan Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Penyesuaian indikator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Rekomposisi pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru, penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan, yaitu

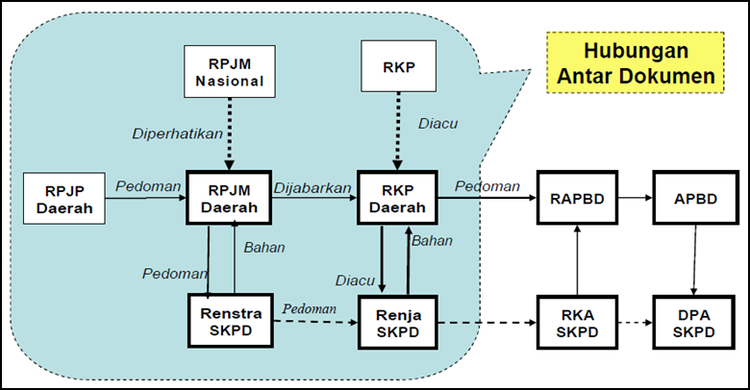
* + - 1. Persiapan penyusunan Perubahan Renja dengan melihat hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun berjalan sehingga dapat diketahui capaian kinerja yang masih perlu mendapat perhatian.
      2. Penyusunan rancangan Perubahan Renja merupakan penyempurnaan usulan dari perangkat daerah dengan memperhatikan kerangka pendanaan daerah
      3. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah penetapan RKPDP sehingga penyusunannya harus mengacu pada RKPDP yang telah ditetapkan.
      4. Penetapan Perubahan Renja yang merupakan tahapan akhir penyusunan renja perangkat daerah dan harus dilaksanakan maksimal dalam 1 bulan setelah penetapan RKPDP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2022 baik terhadap target capaian kinerja maupun anggaran.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo mempunyai keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

* 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renja ini merupakan tahun ke-15 dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Purworejo merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo.
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo serta penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.
  3. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan.
  4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Purworejo untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purworejo. RKPD Kabupaten Purworejo menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD Kabupaten Purworejo menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Purworejo.
  5. Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan RKPD Kabupaten Purworejo

Dokumen Perubahan Renja yang telah disahkan akan menjadi dasar dalam pembahasan untuk menentukan besarnya RAPBDP (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) yang akan diurai lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022.



Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan

* 1. **Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
19. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo ( lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14 seri e nomor 8 );
20. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
21. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (seri D nomor 44).
22. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026 (seri E Nomor 34).
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
24. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 9 Seri A Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 20 Seri A Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 183 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 71 Seri A Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022.
    1. **Maksud dan Tujuan**
28. **Maksud**

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan terkait dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

1. **Tujuan**
   * + 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran dalam kurun waktu tengah semester 2, tahun 2022.
2. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung visi dan misi Bupati .
3. menyediakan acuan resmi bagi DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022
   1. **Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Renja Perubahan.

**BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGANTRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi tentang perubahan nomenklatur, indikator, dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan, Perubahan Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022, dan penjelasan mengenai sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender.

**BAB IV PENUTUP**

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**

Evaluasi Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Evaluasi Renja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD dalam kurun waktu II Triwulan terakhir.

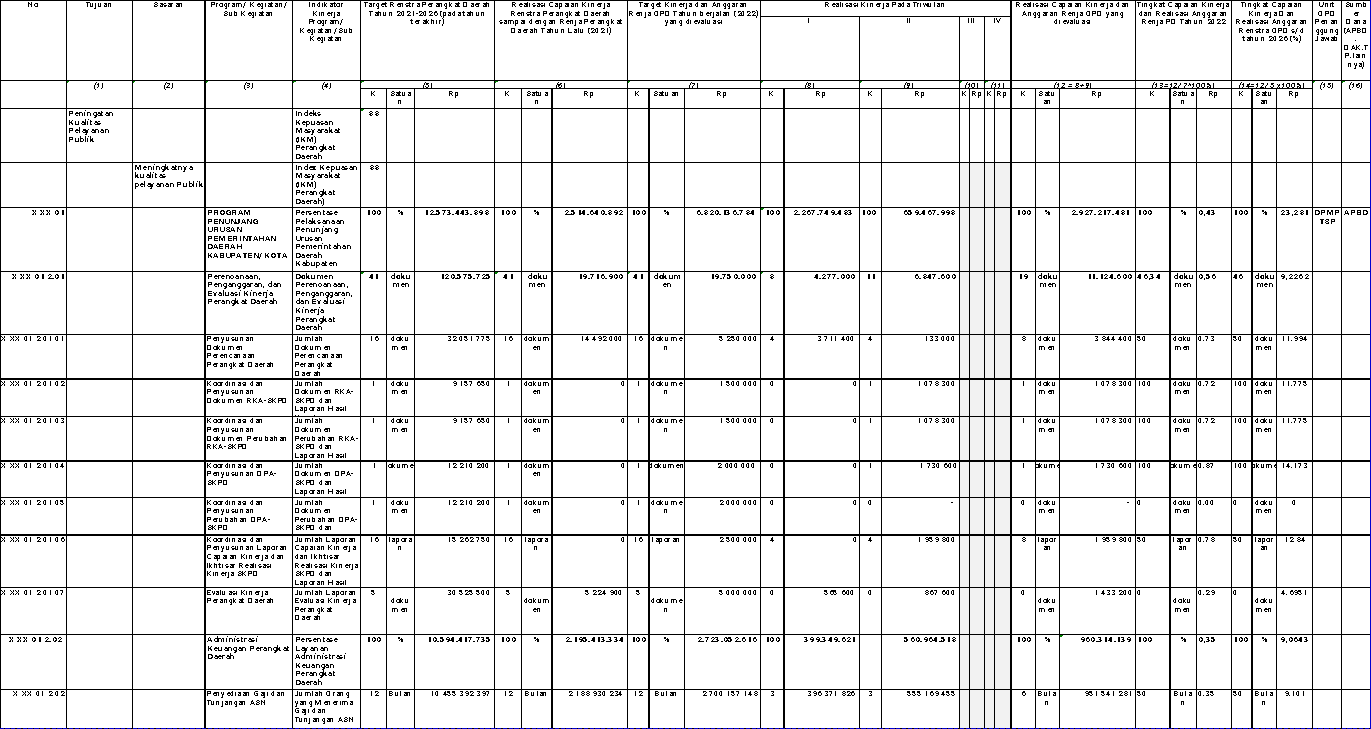
Pada Tahun 2021, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 3.448.285.674 dari pagu RKPD sebesar 3.589.067.148 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan adalah sebesar 3.255.360.478 dari pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 8.100.807.714 dengan persentase capaian kinerja keuangan 40,18%. Capaian kinerja sebesar angka tersebut diatas masih kurang memuaskan / maksimal, dikarenakan masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Penyesuaian pagu dan program kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAK yaitu pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi mundur dari waktu yang sudah direncanakan.
2. Adanya pergeseran rincian belanja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

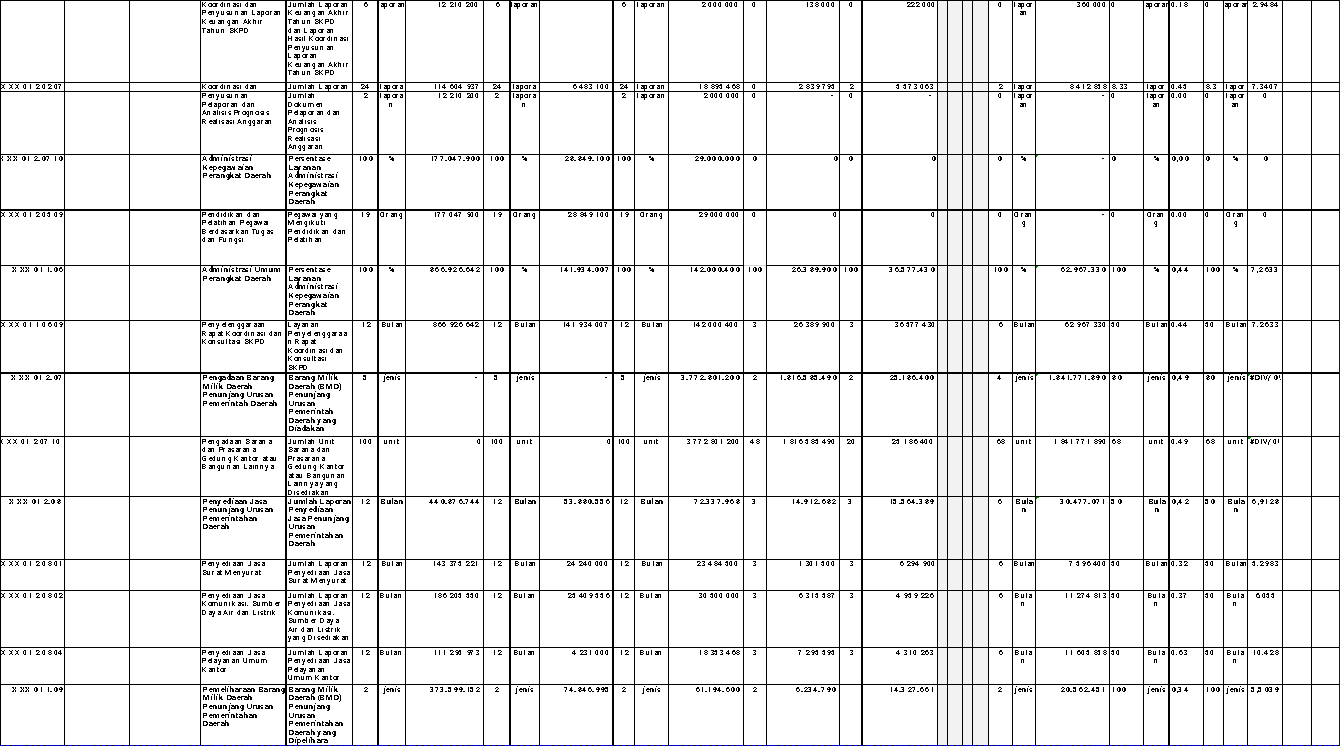
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target kinerja program kegiatan yaitu perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

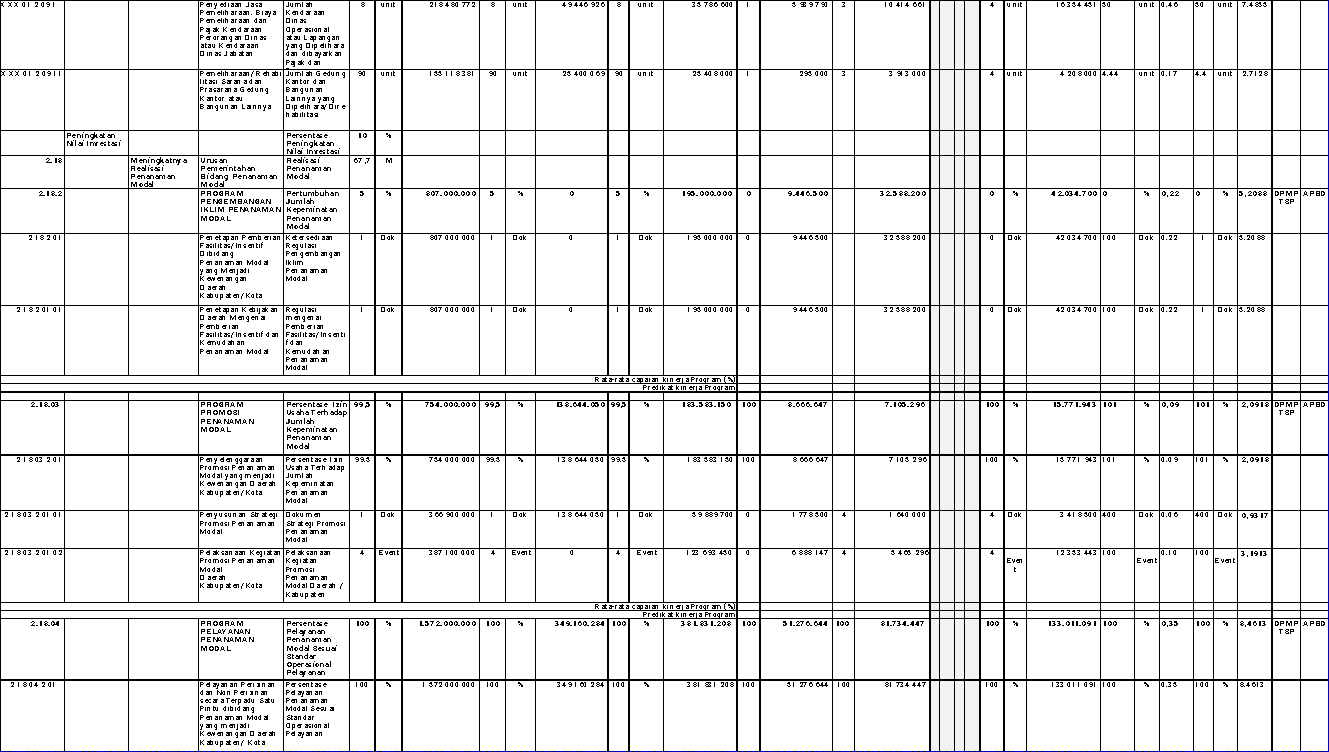
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

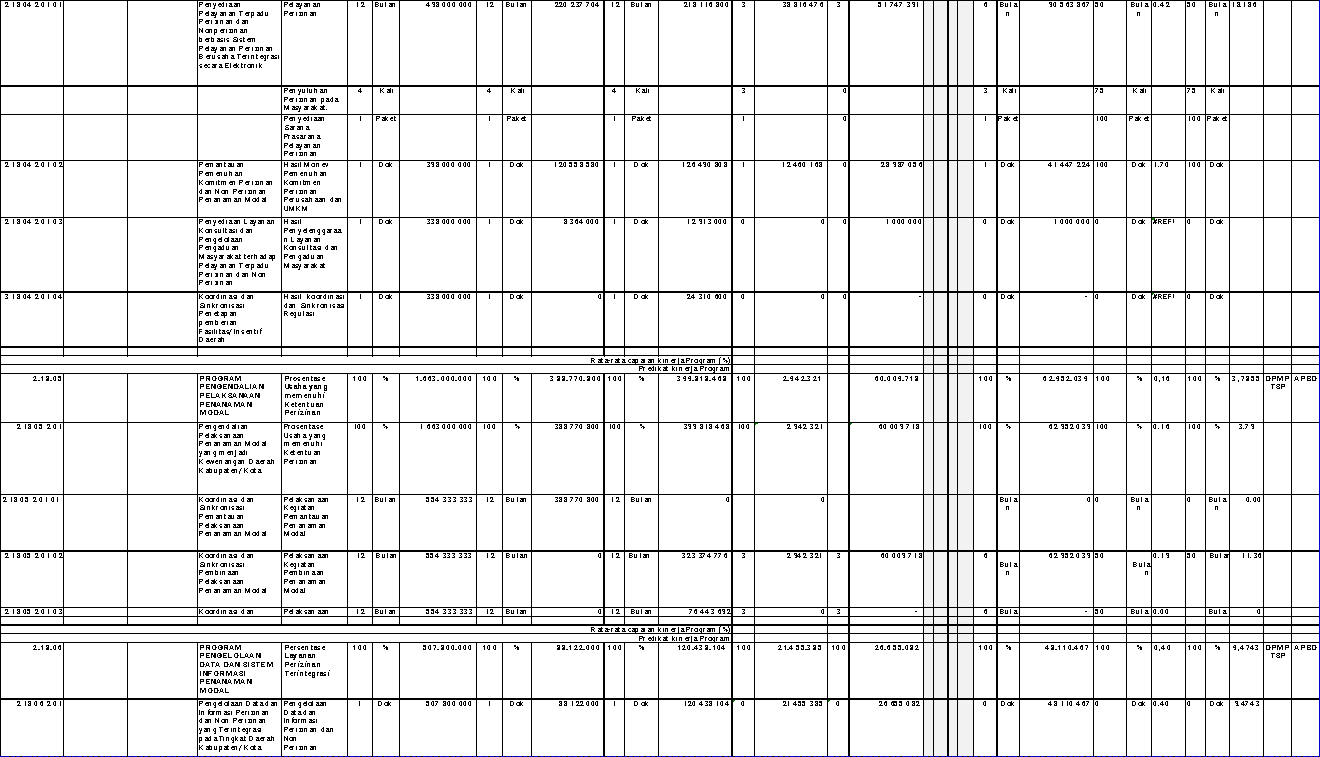
Capaian hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

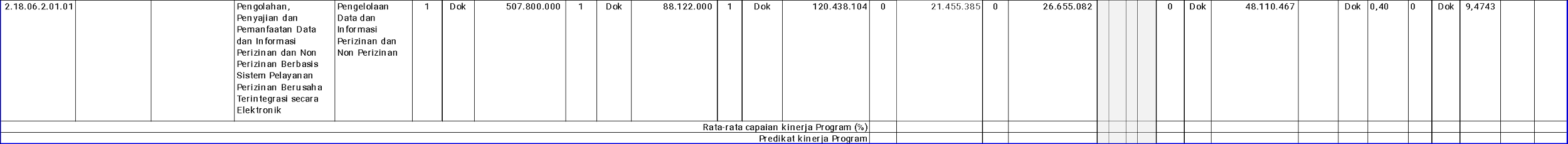


**Tabel 2.1 Evaluasi Renja Tahun 2022 Sampai Triwulan II**









1. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi, Ada 44 ( empat puluh empat ) Perizinan yang dilayani yaitu :

|  |  |
| --- | --- |
| ***NO*** | ***NAMA IZIN*** |
| 1 | IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN |
| 2 | IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM |
| 4 | IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M |
| 5 | IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL |
| 6 | IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH MILIK PMI |
| 7 | IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAH RAGA |
| 8 | IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT |
| 9 | IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI |
| 10 | IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI |
| 11 | IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER |
| 12 | IZIN JAGAL HEWAN |
| 13 | IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS |
| 14 | IZIN LINGKUNGAN |
| 15 | IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH |
| 16 | PKL (IZIN RISET SURVAI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN) |
| 17 | LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT) |
| 18 | IZIN REKLAME |
| 19 | IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET |
| 20 | IZIN OPERASIONAL PANTI |
| 21 | IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG |
| 22 | IZIN PENGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP |
| 23 | IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT |
| 23 | IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT |
| 24 | IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT |
| 25 | IZIN MENDIRIKAN KLINIK |
| 26 | IZIN OPERASIONAL KLINIK |
| 27 | IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN |
| 28 | IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS |
| 29 | SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER) |
|  | SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN) |
| 30 | SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT) |
| 31 | SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN) |
| 32 | SIK-ALM(IZIN PENYELANGGARAAN PRAKTIK AHLI TEGNOLOGI LABOLATORIUM MEDIK) |
| 33 | SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS) |
| 34 | SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI) |
| 35 | SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN) |
| 36 | IZIN KERJA PEREKAM MEDIS |
| 37 | SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS) |
| 38 | ISIPTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL) |
| 39 | IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW) |
| 40 | IZIN KERJA DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIKOT&SIPOT) |
| 41 | IZIN PRAKTIK PSIKOLOG (SIPPK) |
| 42 | IZIN KERJA TENAGA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIK-KESMAS) |
| 43 | IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD) |
| 44 | STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL) |
|  |  |

Dalam melaksanakan pelayanan, DPMPTSP telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

Standar Pelayanan Perizinan (SPP) ini memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder Kabupaten Purworejo khususnya pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya akan kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Sebagai tindak lanjut Standar Pelayanan Perizinan (SPP), dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jaminan pelayanan, dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan adanya Standar Pelayanan ini diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melayani semua pemohon akan semakin mudah untuk dipantau, diawasi dan diukur oleh seluruh stakeholder sehingga secara penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi transparan dan akuntabel.

**Tabel 2.2**

Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Program/ Kegiatan** | **Permasalahan** |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** |  |
| **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Realiasasi capaian kinerja kurang dari 90% dari target dikarenakan adanya pergeseran rincian belanja untuk belanja modal sarana dan prasarana MPP |
| **2** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** |  |
| **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** |  |
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Diperlukan tambahan anggaran untuk pembuatan Baliho, leaflet dan spanduk untuk promosi investasi |
| **3** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** |  |
| **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** |  |
| Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Diperlukan tambahan anggaran untuk penyusunan Perbup Pendelegasian Kewenangan, pelaksanaan kegiatan gebyar pelayanan perizinan dan Launching MPP |
| **4** | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** |  |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Makan Minum dan Pengembangan Aplikasi SI IDA |

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan perlunya perubahan rencana kerja, antara lain:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Realiasasi capaian kinerja kurang dari 90% dari target dikarenakan adanya pergeseran rincian belanja untuk belanja modal sarana dan prasarana MPP.
2. Diperlukannya tambahan anggaran untuk pelaksanaan beberapa kegiatan sehingga perlunya rekomposisi pagu program kegiatan
   1. **Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo,maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan(Strengths) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. **Lingkungan Internal**

**KEKUATAN (S):**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
2. Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik;
3. Adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
4. Telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik (MPP);
5. Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SI IDA);
6. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**KELEMAHAN (W):**

1. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara menurun karena berkurangnya pelaksanaan diklat yang diselenggarakan baik oleh instansi daerah maupun instansi vertikal untuk menambah keahlian dan keterampilan ASN;
3. Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi investasi sektor riil secara optimal.
4. **Lingkungan Eksternal**

**PELUANG (O):**

1. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
2. Banyaknya pengusaha yang akan menanamkan modal
3. Teknologi informasi berkembang pesat;
4. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;
5. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

**ANCAMAN (T):**

1. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
2. Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
3. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo;
4. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus langsung perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
5. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

**BAB III**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Peningkatan pelayanan perizinan dapat diukur dari capaian kinerja layanan berdasarkan peningkatan jumlah izin yang dikeluarkan setiap tahun dan Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) yang meningkat.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun berjalan.

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memuat berbagai perubahan ,pergeseran dan rekomposisi anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada. Penyesuaian perubahan nomenklatur, indikator, dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyesuaian perubahan nomenklatur, indikator, dan target program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijelaskan pada tabel 3.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 3.1 Penyesuaian Indikator Program, Kegiatan, dan Hasil Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kode** | | | | | **Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Program/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan** | | **Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | | **Jenis Keg.** |
| **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahan** | **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahan** | **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahan** | **a/b/c** |
| **2** |  |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** |  |  |  |  |  |
| **2** | **18** |  |  |  | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** |  |  |  |  |  |
| **2** | **18** | **1** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten** | **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten** | **100 %** | **100 %** | **a** |
| **2** | **18** | **1** | **2.01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **36**  **Dokumen** | **7 Dokumen** | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16  Dokumen | 16 Dokumen | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1  Dokumen | 1 Dokumen | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1  Dokumen | 1 Dokumen | a |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1  Dokumen | 1 Dokumen | a |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1  Dokumen | 1 Dokumen | a |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16  Laporan | 16 Laporan | a |
| 2 | 18 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5  Dokumen | 5  Dokumen | a |
| **2** | **18** | **1** | **2.02** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100 %** | **100 %** | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 19 Orang/bulan | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 Laporan | 6 Laporan | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 24 Laporan | 24 Laporan | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.02 | 8 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | 2 Dokumen | **a** |
| **2** | **18** | **1** | **2.05** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat** | **100 %** | **100 %** | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.05 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang / Kali | 20 Orang | **a** |
| **2** | **18** | **1** | **2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100 %** | **100 %** | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Bulan | 1 Laporan | **a** |
| **2** | **18** | **1** | **2.07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **5 Jenis** | **1 Jenis** | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 905 Unit | 905 Unit | **a** |
| **2** | **18** | **1** | **2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah** | **Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **12 Bulan** | **3 Laporan** | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Bulan | 1 Laporan | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Bulan | 1 Laporan | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 1 Laporan | **a** |
| **2** | **18** | **1** | **2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2 jenis** | **2 Jenis** | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 8 Unit | **a** |
| 2 | 18 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit | 80 Unit | **a** |
| **2** | **18** | **2** |  |  | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal** | **Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal** | **5 %** | **5 %** | **a** |
| **2** | **18** | **2** | **2.01** |  | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersusunnya Naskah Akademik Tentang Pemberian Insentif di Bidang Penanaman Modal** | **Tersusunnya Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | **1 Dokumen** | **1 Dokumen** | **a** |
| 2 | 18 | 2 | 2.01 | 1 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Regulasi mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **a** |
| **2** | **18** | **3** |  |  | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan** | **Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan** | **99,5 %** | **99,5 %** | **a** |
| **2** | **18** | **3** | **2.01** |  | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal** | **Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal** | **99,5 %** | **99,5 %** | **a** |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 1 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | **a** |
| 2 | 18 | 3 | 2.01 | 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 4 Event | 1 Dokumen | **a** |
| **2** | **18** | **4** |  |  | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan** | **Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Norma Dan Standar Prosedur Dan Kriteria** | **100 %** | **100 %** | **a** |
| **2** | **18** | **4** | **2.01** |  | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Terlaksananya Pelayanan Perizinanan dan Non Perizinan Untuk Mendukung Penanaman Modal** | **Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan** | **100 %** | **100 %** | **a** |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 1 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Pelayanan Perizinan | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 12 Bulan | 2500 Pelaku Usaha | **a** |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan |  | 1 paket |  | **a** |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyuluhan Perizinan Pada Masyarakat |  | 4 Kali |  | **a** |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 2 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Hasil Monev Pemenuhan Komitmen Perizinan Perusahaan dan UMKM | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal | 1 Dokumen | 20 Kegiatan Usaha | **a** |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 3 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Hasil Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 1 Dokumen | 20 Orang | **a** |
| 2 | 18 | 4 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 1 Dokumen | 30 Kegiatan Usaha | **a** |
| **2** | **18** | **5** |  |  | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentasae Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan** | **Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Nspk** | **100 %** | **100 %** | **a** |
| **2** | **18** | **5** | **2.01** |  | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terpenuhinya Ketentuan Perizinan pada Perusahaan** | **Terpenuhinya Ketentuan Perizinan Berusaha** | **100 %** | **100 %** | **a** |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 12 Bulan | 8 Pelaku Usaha | **a** |
| 2 | 18 | 5 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 12 bulan | 249 Kegiatan Usaha | **a** |
| **2** | **18** | **6** |  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi** | **Persentase Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Disediakan** | **100 %** | **100 %** | **a** |
| **2** | **18** | **6** | **2.01** |  | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi** | **Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi** | **1**  **Dokumen** | **1 Dokumen** | **a** |
| 2 | 18 | 6 | 2.01 | 1 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Pemeliharaan Aplikasi Perizinan | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 12  bulan | 4 Dokumen | **a** |
|  |  |  |  |  |  |  | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan |  | 12 bulan |  |  |

Pergeseran anggaran dilakukan karena adanya perubahan volume kegiatan serta dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rekomposisi pagu anggaran dilakukan karena adannya beberapa kegiatan yang membutuhkan tambahan anggaran, antara lain untuk :

1. Pelaksanaan Grand Launching Mal Pelayanan Publik;
2. Pelaksanaan Kegiatan Gebyar Pelayanan Perizinan;
3. Pembuatan media informasi untuk promosi investasi (Baliho,spanduk, leaflet);
4. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam/luar daerah.

Program Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yang merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal sebesar 5% yang difokuskan pada penyusunan regulasi pengembangan iklim penanaman modal.

1. **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase ijin usaha dan/atau izin komersial/ izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal sebesar 99,5%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada penyusunan Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal dan pelaksanaan kegiatan promosi.

1. **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase layanan perizinan sesuai SOP (Standar Operasional Pelayanan) sebesar 100% yang difokuskan pada penyediaan layanan perizinan sesuai SOP, penyuluhan perizinan pada masyarakat, serta didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan, serta koordinasi pemberian fasilitas/insentif. Program ini mendukung program unggulan Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM, perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam :

1. Penyedia sarana dan prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik
2. Pengendali kegiatan operasional dimana terdapat 24 gerai pelayanan yang terdiri dari Perangkat Daerah, Kementerian, Badan Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya.
3. Memberikan layanan konsultasi tentang perizinan dan penanaman modal untuk pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Purworejo.
4. **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Usaha yang memenuhi Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) sebesar 100% yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan, dan pengawasan penanaman modal.

1. **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Disediakan sebesar 100%. Pencapaian indikator program ini difokuskan pada pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan serta pemeliharaan aplikasi perizinan.

Dalam pelaksanaan perubahan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo, DPMPTSP akan melaksanakan 6 Program, 12 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan lokasi pelaksanaan di Kabupaten Purworejo dan Di Luar Kabupaten Purworejo. Kebutuhan dana/pagu indikatif Dpmptsp adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |
| **NO** | **URUSAN** | **PROGRAM** | **PAGU INDIKATIF (Rp.)** | **SUMBER DANA** | **PD PELAKSANA** |
| 1. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 228.320.000 | APBD | DPMPTSP |
|  |  | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 203.144.150 | APBD | DPMPTSP |
|  |  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 498.437.208 | APBD | DPMPTSP |
|  |  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 399.818.468 | APBD & DAK | DPMPTSP |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 150.294.104 | APBD | DPMPTSP |
|  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.201.703.180 | APBD | DPMPTSP |
|  | **TOTAL** | | **7.681.717.110** | | |

Rencana program dan pagu perubahan anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan pada tabel 3.2

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo

Tahun 2022

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo dalam melaksanakan Program Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 sudah mendukung Pengarusutamaan gender yaitu pada Program Pelayanan Penanaman Modal pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN** | **SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN/SASARAN SUB KEGIATAN** |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten** |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |

Tabel 3.3 SASARAN PROGRAM, KELUARAN KEGIATAN, DAN SASARAN SUB KEGIATAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |
|  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |
|  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan** |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara** |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| **2** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Meningkatnya Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Ketersediaan Regulasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal** |
|  | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal |
| **3** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Terbitnya Nomor Induk Berusaha** |
|  | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal** |
|  | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota |
|  | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota |
| **4** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Norma Standar Prosedur Dan Kriteria** |
|  | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** | **Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan** |
|  | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha |
|  | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha |
|  | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha |
| **5** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Pelaku Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Nspk** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan** |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha |
| **6** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Tersedianya Jenis Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan** |
|  | **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Data informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi** |
|  | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purworejo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan dan digunakan sebagai rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022. Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo ini telah disusun seoptimal mungkin dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 antara lain:

1. Perubahan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo ini dilandasi dengan hasil evaluasi kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 sampai dengan triwulan II.
2. Penyesuaian indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan menyesuaikan adanya perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Renja DPMPTSP ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022;

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 pada akhir tahun 2022;

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Purworejo, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Dengan disusunnya Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Purworejo, 1 Agustus 2022  KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  KABUPATEN PURWOREJO  **AGUNG WIBOWO, AP.,MM.**  Pembina Utama Muda  NIP. 19740308 199311 1 002 | |